

RUU JPSK Harus Selesai

Jangan Membuat Pembahasan di Luar Senayan

Senin, 12 Januari 2009 | 00:52 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah menempatkan posisi DPR pada bab khusus dalam Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Ini untuk memperjelas hubungan pemerintah dan DPR saat menanggulangi dampak krisis keuangan yang bisa terjadi lebih buruk dari krisis tahun 1997.

Masa sidang DPR akan berlangsung 19 Januari-April 2009. Meski cukup panjang, pemerintah tetap berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) tersebut bisa dilakukan dengan cepat bersama DPR.

"Semua orang berharap ada kepastian hukum dalam penanganan krisis keuangan yang bisa terjadi. Meski demikian, kami berharap tidak ada lembaga keuangan yang mengalami persoalan sehingga memaksa kita menggunakan itu (aturan JPSK)," ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Sri Mulyani, RUU JPSK yang sedang disusun pemerintah saat ini akan mengakomodasi pendapat sepuluh fraksi yang dinilai positif dan konstruktif. Akomodasi itu akan menyangkut tujuh hal.

Pertama, memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah dan Bank Indonesia pada saat krisis terjadi.

Kedua, hubungan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan Presiden.

Ketiga, memantapkan prosedur penetapan kondisi krisis.

Keempat, mengatur peranan BI dalam memperkuat sektor perbankan.

Kelima, penyampaian informasi tentang kondisi krisis kepada Presiden.

Keenam, hubungan KSSK dengan DPR, terutama pada saat krisis menimbulkan dampak terhadap APBN.

Ketujuh, pengaturan ulang status hukum pejabat yang mengambil keputusan di saat situasi sedang krisis.

Sebelumnya, pemerintah mengajukan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut menjadi UU pada masa sidang terakhir tahun 2008. Namun, sebagian besar fraksi di DPR menolak. Sebagai gantinya, DPR meminta pemerintah mengajukan aturan JPSK itu dalam bentuk lain, yakni dalam bentuk RUU.

Pertemuan di Bali

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Rizal Djali, mengatakan, posisi DPR dalam RUU JPSK jangan diatur secara sepihak oleh pemerintah, tetapi ditetapkan secara bersama-sama dalam masa sidang nanti.

"Jadi, bukan pengaturan bab yang kami inginkan, tetapi hak budget DPR tetap dikedepan-kan. Selain itu, jangan membuat pembahasan di luar Senayan, seperti pertemuan beberapa anggota DPR di Bali hari ini (Minggu, 11 Januari 2009) dengan pemerintah karena tidak semua anggota, termasuk saya, bisa hadir. Jangan ada forum-forum informal seperti itu," ujarnya.

Posisi Presiden juga jangan dilangkahi oleh KSSK karena semua dampak anggaran yang terjadi akibat krisis harus ditanggung oleh pemerintah. (OIN)